

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang kaya akan segala jenis sumber daya alam dan keragaman budaya. Sebagai negara demokrasi yang muda dan dinamis, Indonesia mengalami urbanisasi dan modernisasi yang pesat. Sehingga dua puluh tahun setelah Krisis Keuangan Asia tahun 1998 dan sepuluh tahun setelah Krisis Keuangan Global, standar hidup penduduk Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan perekonomiannya juga lebih tangguh. PDB per kapita naik 70% dalam dua puluh tahun terakhir. Berakhirnya *booming* harga komoditas membebani pendapatan dan penerimaan pemerintah, namun pertumbuhan PDB masih bertahan di sekitar 5% dan pendapatan per kapita meningkat hampir 4% per tahun. Angka kemiskinan telah menurun baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Belakangan ini, sebarannya juga makin membaik: koefisien Gini untuk konsumsi terus menurun sejak 2015. Kebijakan makroekonomi yang hati-hati dan adanya kemajuan dalam reformasi struktural telah diakui oleh lembaga pemeringkat kredit dan Indonesia terus naik dalam peringkat Internasional untuk daya saing dan lingkungan usaha. Sejak tahun 2015, Indonesia melonjak naik 34

posisi dalam peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dari Bank Dunia, menjadi peringkat ke 72.¹

Pertumbuhan PDB tetap berada dikisaran 5% sejak tahun 2013. Kebijakan makroekonomi yang mendukung, keyakinan yang lebih besar, dan permintaan eksternal yang lebih besar mendorong kegiatan perekonomian pada tahun 2017 dan momentum ini berlanjut hingga 2018. Konsumsi terus menjadi penopang pengeluaran. Keyakinan konsumen relatif tinggi dan angka pengangguran telah menurun, sehingga mendukung kenaikan pendapatan. Investasi infrastruktur meningkat kuat meski naik dari tingkat yang rendah, dan impor barang modal melonjak tinggi. Sektor jasa tumbuh dengan kuat. Kenaikan harga komoditas, terutama untuk produk-produk mineral, mendukung kegiatan pertambangan. Lingkungan usaha secara keseluruhan lebih bersahabat berkat reformasi peraturan yang terus berjalan.²

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh dalam rangka menopang stabilitas perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global yang meningkat, di mana kebijakan fiskal 2018 difokuskan pada memperkuat prospek kesinambungan fiskal dengan tetap mengoptimalkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Pemerintah tetap menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) sebagai piranti kontrasiklikal kebijakan makroekonomi untuk menjaga momentum pemulihan

¹ OECD Economic Survey, *Survey Ekonomi OECD Indonesia 2018*, (Tahun 2018), hlm. 8.

² *Ibid*, hlm. 10.

ekonomi. Bersamaan dengan arah kebijakan ini, penguatan kebijakan struktural terus ditempuh guna meningkatkan kapasitas perekonomian, yang pada akhirnya bertujuan menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.³

Strategi yang ditempuh dapat memperkuat prospek kesinambungan fiskal, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Prospek kesinambungan fiskal membaik tergambar pada defisit keseimbangan primer 2018 yang menurun mencapai 1,86 miliar rupiah atau 0,01% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan itu, realisasi defisit APBN 2018 juga menurun menjadi 1,76% dari PDB. Rasio hutang Pemerintah terhadap PDB tetap pada level sehat di kisaran 30% pada 2018. Sementara itu, belanja untuk program perlindungan sosial dan stimulus fiskal daerah yang meningkat, serta pengeluaran untuk infrastruktur turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi 2018.⁴

Adapun secara umum disimpulkan beberapa variabel penting yang digunakan dalam menilai perekonomian Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dibidang ekonomi.

Pertumbuhan tersebut merupakan gambaran tingkat perkembangan ekonomi

³ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), hlm. 138.

⁴ *Ibid*, hlm. 138.

yang terjadi pada suatu negara.⁵ Sehingga, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

PDB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku sering disebut dengan PDB nominal yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut. Sementara PDB atas dasar harga konstan, sering disebut PDB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB atas dasar harga berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Sementara PDB atas dasar harga konstan memperlihatkan tingkat

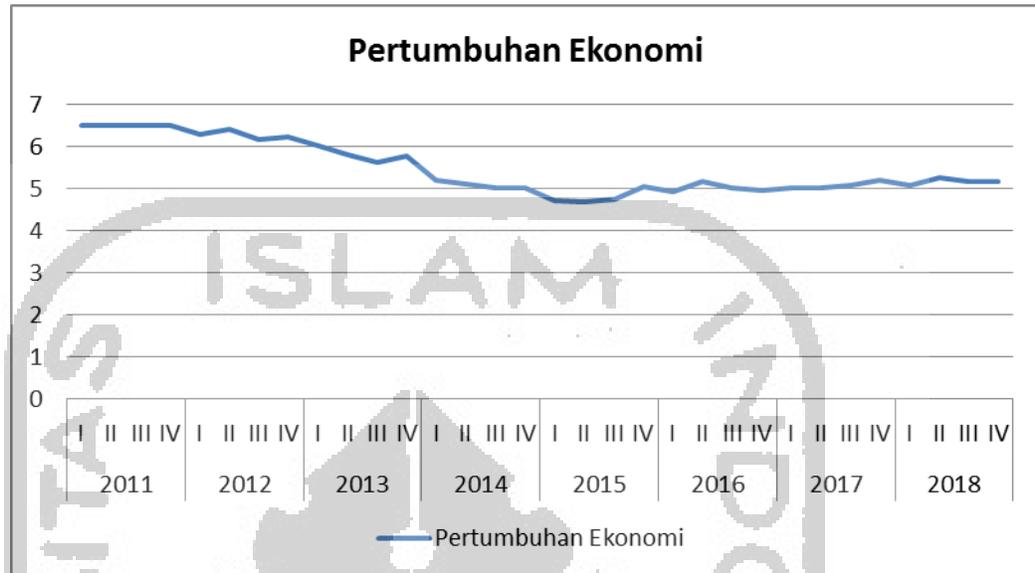
⁵ Dara Resmi Asbiantari, dkk, "Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2016), hlm. 13.

pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan PDB atas harga konstan. Dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan pertumbuhan yang masih mengandung kenaikan/ penurunan harga. Tahun dasar yang digunakan BPS dalam penghitungan PDB adalah tahun dasar 2010.

Berdasarkan data laporan publikasi Badan Pusat statistik, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Pada triwulan IV tahun 2018 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18 persen melenceng dari target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen, meski demikian pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2018 lebih tinggi dari triwulan III tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 terjadi pada seluruh lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,08 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,94 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,80 persen.

⁶Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Bruto”, dikutip dari <http://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html>, diakses pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 jam 10.30 WIB.



Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2011-2018
Sumber: BPS, Statistik Indonesia diolah

2. Inflasi

Pergerakan laju inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan dampak krisis tahun 2008 sehingga Indonesia masih dalam tahap perbaikan kondisi ekonomi. Pergerakan laju inflasi pada tahun 2014 dan 2015 terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan dan energi. Tekanan harga energi yang cukup besar, terutama minyak mentah memaksa Pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan reformasi subsidi energi. Kebijakan reformasi subsidi energi dilakukan untuk mengurangi beban fiskal dengan merelokasi anggaran belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif.

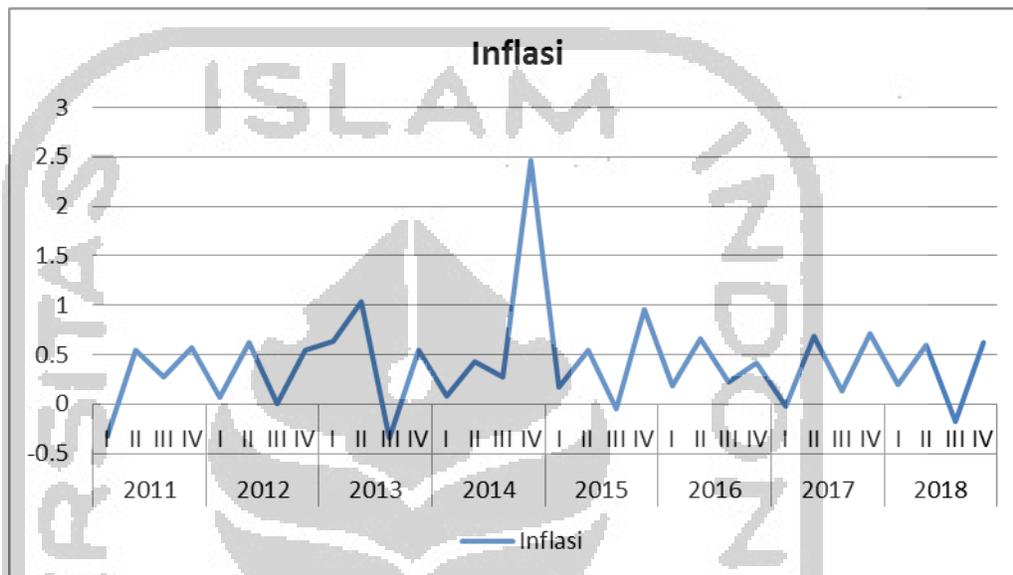
Meskipun dampak inflasi di sisi *administered price* cukup besar, namun pemerintah tetap dapat mengendalikan inflasi pada level *single digit*,

yaitu sebesar 8,36% di tahun 2014 dan 3,35% di tahun 2015. Tren inflasi menurun berlanjut dengan laju sebesar 3,02% di tahun 2016, kemudian 3,61% di tahun 2017, hingga 3,13% di tahun 2018. Keseimbangan sisi permintaan dan penawaran yang dapat dijaga dan terkendalinya inflasi komponen *adminstered price* menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan inflasi. Komponen *core* mengalami tren menurun seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, stabilnya harga pangan dan lancarnya distribusi berdampak pada cukup terkendalinya inflasi komponen *vilatile food*, terutama pada masa hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN).⁷

Adapun inflasi pada tahun 2018-2019 diperkirakan tetap rendah dan stabil pada kisaran 3,5 persen, di mana pada triwulan IV tahun 2018 inflasi Indonesia sebesar 0,62 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,45 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,22 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,13 persen; kelompok sandang sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,20 persen; kelompok

⁷ Fadhiah Khairina, dkk, *Outlook Perekonomian Indonesia 2019: Meningkatkan Daya Saing untuk Mendorong Ekspor*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019), hlm. 19-20.

pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,10 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,28 persen.⁸



Gambar 4.2 Grafik Tingkat Inflasi Indonesia 2011-2018

Sumber: BPS, Statistik Indonesia diolah

Berdasarkan pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi Indonesia pada triwulan I-triwulan IV tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi, di mana garis inflasi paling tinggi pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 2,46 persen. Berfluktuasinya tingkat inflasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengalami fluktuasi. Meski demikian seperti yang sudah dicatat di atas bahwa inflasi Indonesia masih berada pada taraf yang aman dan justru diprediksi akan memacu pertumbuhan ekonomi.

⁸ Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi”, dikutip dari <http://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/02/1540/desember-2018-inflasi-sebesar-0-62-persen-html>, diakses pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 09.00 WIB.

3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja Pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam Nota Keuangan beserta APBN 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa belanja negara diarahkan di antaranya untuk: (1) meningkatkan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; dan (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Selain itu, kebijakan belanja ditujukan untuk: (1) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan dan Beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi

data penerima; (2) penguatan pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; dan (3) penyaluran subsidi program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih *akuntabele*.⁹

Adapun alokasi belanja prioritas yang sangat masif dengan beberapa target capaian pada tahun 2017, yaitu target di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan sepanjang 886 km, jalan tol sepanjang 27 km, jembatan sepanjang 12.380 m, jalur kereta api sepanjang 165 km², serta rumah susun sebanyak 13.253 unit. Sedangkan target bidang pendidikan, di antaranya program Indonesia pintar sebanyak 19,7 juta jiwa, beasiswa bidik misi sebanyak 362,7 ribu mahasiswa, dan pembangunan/renovasi sebanyak 77 ribu sekolah/ruang kelas. Sementara itu, target bidang kesehatan, antara lain program Indonesia sehat sebanyak 92,4 juta jiwa, tersedianya sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas kepada 48 rumah sakit/balai kesehatan, serta program imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan mencapai 92 persen. Selanjutnya untuk target bidang kedaulatan pangan di antaranya pembangunan jaringan irigasi sebanyak 1.103 km, irigasi tersier sebanyak 100 ribu ha, bendungan sebanyak 39 unit, embung sebanyak 111 unit, tersedianya

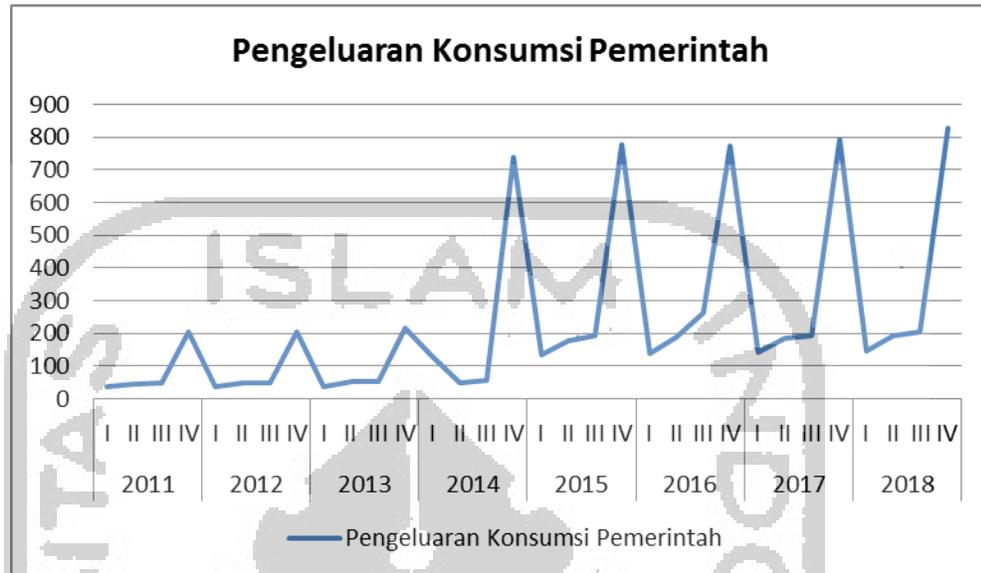
⁹ Kementerian Keuangan, “Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, dikutip dari <http://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev//>, diakses pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 11.10 WIB, hlm. 36

produksi perikanan 30,2 juta ton, dan disalurkan bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial Rastha dan bantuan pangan nontunai kepada 15,6 juta KPM, serta subsidi pupuk 9,55 juta ton.¹⁰

Berdasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengeluaran konsumsi Pemerintah mencatat kenaikan dari tahun ke tahun. Hingga triwulan IV tahun 2018 jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 828,7 triliun rupiah. Besarnya pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2018 karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan, seperti dalam mendukung ketahanan air dan pangan. pemerintah pada tahun 2018 membangun 8 bendungan dan telah rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, teritip di Balikpapan, Raknamo, dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap hingga tahun 2023.¹¹

¹⁰ Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2018), hlm. 1-3.

¹¹ *Ibid.*



**Gambar 4.3 Grafik Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Indonesia
2011-2018**

Sumber: BPS, Statistik Indonesia diolah

4. Hutang Luar Negeri

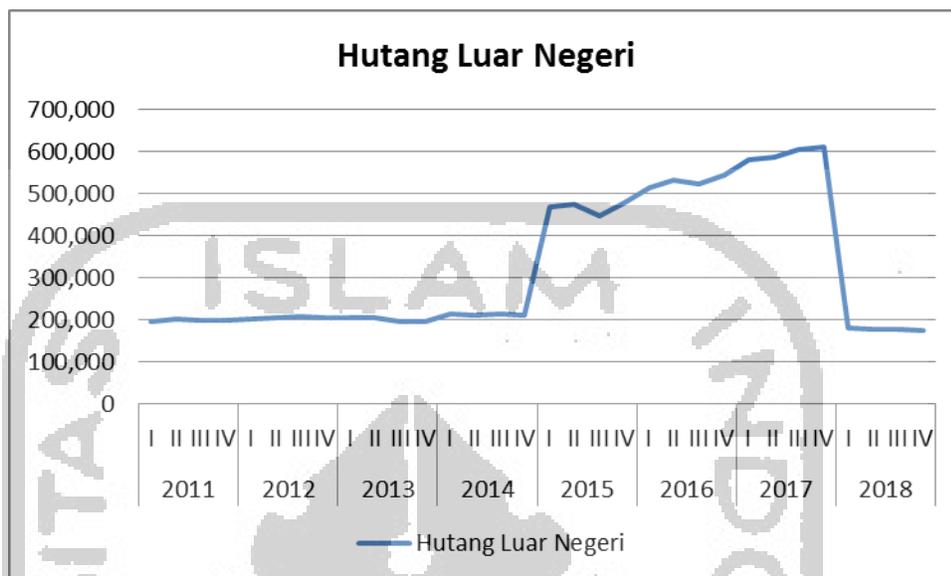
Dalam publikasi Bank Indonesia (BI), hutang luar negeri didefinisikan sebagai hutang penduduk (*resident*) yang berdomisili di suatu wilayah teritorial ekonomi kepada bukan penduduk (*non resident*).

Hutang luar negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah hutang luar negeri pemerintah. Hutang luar negeri pemerintah adalah hutang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari hutang *bilateral*, *multilateral*, komersial, *supplier* dan Surat Berharga Nasional (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (*Ijarah Fixed Rate/IFR*) dan Global Sukuk.¹²

Adapun hutang luar negeri Pemerintah tumbuh meningkat pada tahun 2011-2017, kemudian menurun pada tahun 2018. Posisi HLN Pemerintah pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 175,352 juta dolar AS atau tumbuh 3,3% (yoy). Kendati demikian nilai nominal HLN Pemerintah pada triwulan IV tahun 2018 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan III tahun 2018 yang mencapai 176,131 juta dolar AS. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya posisi pinjaman dan SBN yang dimiliki oleh investor asing.

¹² Bank Indonesia, halaman IX.



Gambar 4.4 Grafik Hutang Luar Negeri Indonesia 2011-2018
Sumber: BI, Statistik Bank Indonesia diolah

Diketahui komposisi hutang luar negeri Pemerintah sampai akhir triwulan IV tahun 2018 terdiri dari pinjaman *bilateral* sebesar 21,976 juta dolar AS, pinjaman komersial sebesar 3,021 juta dolar AS, dan pinjaman *multilateral* sebesar 29,351 dolar AS. Kemudian pinjaman surat berharga antara lain SBN internasional sebesar 64,242 juta dolar AS dan SBN domestik sebesar 56,762 juta dolar AS.

5. Pembiayaan Syariah

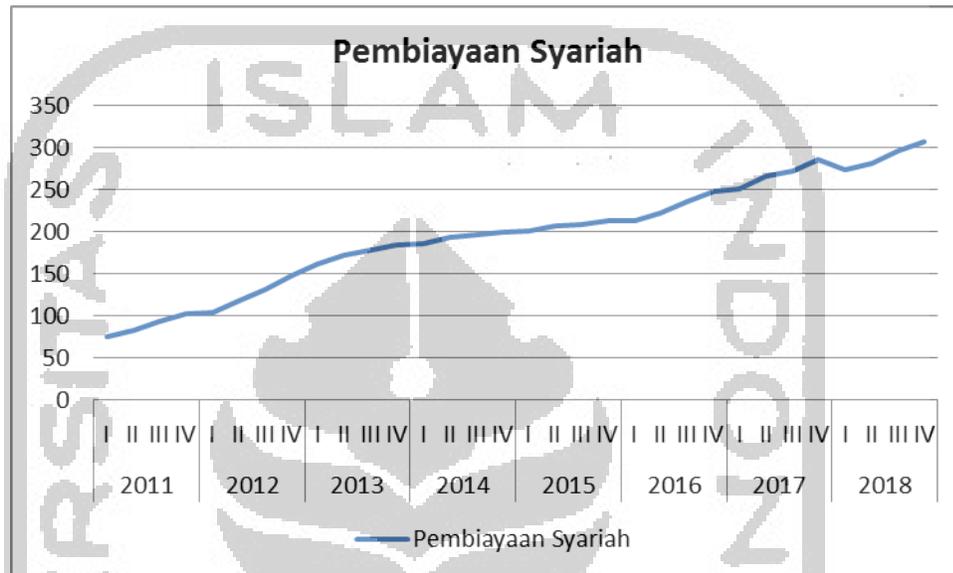
Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset tahun 2011

(yoy) telah mencapai 127,19 triliun rupiah atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir.

Komitmen perbankan syariah untuk menggerakkan sektor *rill* tidak saja diimplementasikan dengan cukup baik namun juga telah diusahakan secara terus menerus dalam mengoptimalkan pencapaiannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor *rill* telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Sebesar 306,996 miliar rupiah diinvestasikan ke dalam sektor *rill*. Terdiri dari pembiayaan *mudharabah* sebesar 14.940 miliar rupiah pada triwulan IV tahun 2018, pembiayaan *musyarakah* 121.915 miliar rupiah, pembiayaan *murabahah* sebesar 151.580 miliar rupiah, pembiayaan *qard* sebesar 7.665 miliar rupiah, pembiayaan *istishna'* sebesar 1.609 miliar rupiah dan pembiayaan *ijarah* sebesar 9.288 miliar rupiah.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan jumlah penyaluran pembiayaan syariah oleh perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2011-2018. Hingga triwulan IV tahun 2018 diketahui jumlah pembiayaan syariah sebesar 306,996 miliar rupiah, meningkat 21,301 juta rupiah dari triwulan IV tahun 2017 sebesar 285,695 miliar rupiah. Meningkatnya jumlah pembiayaan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi perekonomian negara. Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yakni kaitannya dengan menambah faktor produksi atau

memperluas pangsa pasar. Sehingga *output* perusahaan meningkat dan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan.



Gambar 4.5 Grafik Pembiayaan Syariah Indonesia 2011-2018
Sumber: OJK, Statistik Otoritas Jasa Keuangan diolah

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah di Indonesia yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama kurun waktu 8 tahun yakni tahun 2011-2018.

Berdasarkan hasil uji statistik yang sudah peneliti lakukan maka diambil kesimpulan analisis deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif

	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Hutang Luar Negeri	Pembiayaan Syariah
Mean	5.464063	0.414375	229.1469	322.6329	196.7816
Median	5.180000	0.425000	161.4500	207.7760	200.0210
Maximum	6.500000	2.460000	828.7000	611.3460	306.9960
Minimum	4.670000	-0.350000	36.30000	175.3520	74.25300
Std. Dev.	0.618968	0.505811	250.7018	166.7987	65.64485
Skewness	0.615044	1.927771	1.617859	0.629866	-0.217254
Kurtosis	1.834435	9.501744	4.089723	1.569228	2.142152

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Variabel Pertumbuhan Ekonomi pada tabel 4.1 di atas mempunyai nilai maksimum sebesar 6,500000 atau 6,50 persen yaitu pada tahun 2011 dan nilai minimum sebesar 4,670000 atau 4,67 persen yaitu pada tahun 2015, dengan standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 0,618968. Sementara nilai rata-ratanya sebesar 5,464063 atau 5,46 persen dan nilai median sebesar 5,180000 atau 5,18 persen, karena nilai mean lebih besar dari nilai median ($5,464063 > 5,180000$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 0,615044, karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($0,615044 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 1,834435, karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($1,834435 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Selanjutnya variabel Inflasi mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,414375 atau 0,41 persen dengan nilai median sebesar 0,425000 atau 0,42 persen. Karena nilai mean lebih kecil dari nilai median ($0,414375 < 0,425000$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kiri atau dikatakan bahwa variabel inflasi terdistribusi negatif. Untuk nilai maksimum pada variabel inflasi sebesar 2,460000 atau 2,46 persen yaitu pada tahun 2014 dan nilai minimum sebesar -0,350000 atau -0,35 persen pada tahun 2013, di mana nilai standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 0,505811. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 1,927771, karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($1,927771 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari *kurtosis* (keruncingan) sebesar 9,501744, karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($9,501744 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Variabel pengeluaran Konsumsi Pemerintah diketahui mempunyai nilai maksimum sebesar 828,7000 yaitu pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 36,30000 pada tahun 2011, di mana nilai standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 250,7018. Sementara rata-rata variabel pengeluaran konsumsi Pemerintah sebesar 229,1469 dan nilai median sebesar 161,4500, karena nilai mean lebih besar dari nilai median ($229,1469 > 161,4500$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel pengeluaran konsumsi Pemerintah terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 1,617859, karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($1,617859 > 0$) maka distribusi data

positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 4,089723, karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($4,089723 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Sedangkan variabel Hutang Luar Negeri mempunyai nilai maksimum sebesar 611,3460 yaitu pada tahun 2017, dengan nilai minimum 175,3520 pada tahun 2018, di mana standar deviasi atau sebaran data sebesar 166,7987. Adapun nilai rata-rata variabel hutang luar negeri sebesar 322,6329 dan nilai median sebesar 207,7760, karena nilai mean lebih besar dari nilai median ($322,6329 > 207,7760$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kanan atau dikatakan bahwa variabel hutang luar negeri terdistribusi positif. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar 0,629866, karena nilai *skewness* lebih besar dari 0 ($0,629866 > 0$) maka distribusi data positif sehingga membentuk kurva condong ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 1,569228, karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($1,569228 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

Variabel Pembiayaan Syariah mempunyai nilai rata-rata sebesar 196,7816, dengan nilai median sebesar 200,0210. Karena nilai mean lebih kecil dari nilai median ($196,7816 < 200,021$) maka disimpulkan distribusi data miring ke kiri atau dikatakan bahwa variabel pembiayaan syariah terdistribusi negatif. Untuk nilai maksimum pada variabel pembiayaan syariah sebesar 306,9960 yaitu

pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 74,25300 pada tahun 2011, di mana nilai standar deviasi atau sebaran datanya sebesar 65,64485. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan) sebesar -0,217254, karena nilai *skewness* lebih kecil dari 0 ($-0,217254 < 0$) maka distribusi data negatif sehingga membentuk kurva condong ke kiri. Sedangkan jika dilihat dari nilai *kurtosis* (keruncingan) sebesar 2,142152, karena nilai *kurtosis* lebih besar dari 0,263 ($2,142152 > 0,263$) maka kurva yang dibentuk adalah *leptokurtis* (sangat runcing), artinya distribusi data sangat bagus.

C. Hasil Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Konsep yang dipakai untuk menguji stasioner suatu data runtut waktu adalah uji akar unit. Apabila suatu data runtut waktu bersifat tidak stasioner, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tengah menghadapi persoalan akar unit (*unit root problem*).

Untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak bisa dilakukan menggunakan uji akar unit dengan metode *Dickey-Fuller* (*Dickey-Fuller test*) yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah data stasioner pada level atau *diffrence*. Data dikatakan stasioner apabila nilai probabilitas pada *Dickey-Fuller test* lebih kecil dari 0,05. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner.

Kriteria uji *unit root*/stasioneritas data:

- a. H_0 : Ada *unit root*
 H_a : Tidak ada *unit root*
- b. Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- c. Statistik uji : nilai ADF
- d. Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai ADF > Critical value ($\alpha = 5\%$)
- e. Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai ADF < Critical Value ($\alpha = 5\%$)

Di bawah ini adalah hasil uji akar unit pada variabel penelitian yang terdiri dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Akar-akar Unit dengan Augmen Dickey-Fuller test pada Level

ADF Statistik	Tanda	Nilai Kritis 1%	Nilai Kritis 5%	Nilai Kritis 10%	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi					
-1.662202	>	-3.661661	2.960411	-2.619160	Tidak Stasioner
Inflasi					
-8.159948	<	-3.661661	-2.960411	-2.619160	Stasioner
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					
-0.739076	>	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Tidak Stasioner
Hutang Luar Negeri					
-1.519218	>	-3.661661	-2.960411	-2.619160	Tidak Stasioner
Pembiayaan Syariah					
-0.958748	>	-3.661661	-2.960411	-2.619160	Tidak Stasioner

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan table 4.2, maka diketahui sebagian besar variabel tidak stasioner pada derajat level. Hanya variabel Inflasi yang stasioner. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah tidak stasioner. Oleh karena itu, untuk keperluan regresi ECM maka perlu dilakukan proses diferensiasi terhadap data tersebut agar data stasioner pada derajat yang sama. Dengan prosedur yang sama seperti langkah di atas maka hasil uji akar-akar unit *Augmented Dickey Fuller* (ADF) test pada derajat *first difference*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Akar-akar Unit dengan Augmen Dickey-Fuller test pada Firs Difference

ADF Statistik	Tanda	Nilai Kritis 1%	Nilai Kritis 5%	Nilai Kritis 10%	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi					
-6.866702	<	-3.670170	-2.963972	-2.621007	Stasioner
Inflasi					
-5.047505	<	-3.711457	-2.981038	-2.629906	Stasioner
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					
-20.71663	<	-3.689194	-2.971853	-2.625121	Stasioner
Hutang Luar Negeri					
-5.276492	<	-3.670170	-2.963972	-2.621007	Stasioner
Pembiayaan Syariah					
-5.044749	<	-3.670170	-2.963972	-2.621007	Stasioner

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019-

Hasil uji akar-akar unit *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) test pada derajat *first difference* menunjukkan bahwa semua data telah stasioner pada derajat yang sama yaitu *first difference*.

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dan derajat integrasi pada *first difference* terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi untuk mengetahui parameter jangka panjang. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji kointegrasi adalah dengan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Uji ADF untuk melihat apakah *residual* regresi terkointegrasi atau tidak.

2. Uji Kointegrasi

Pengujian kointegrasi antar variabel bertujuan untuk melihat hubungan atau keseimbangan jangka panjang pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji adanya kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji *Engle-Granger* dan langkah uji *Johansen*. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan uji *Engle-Granger*.

Ketentuan pengujian kointegrasi yaitu apabila pada tingkat level nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Jika pada tingkat level nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dikatakan data tidak terkointegrasi dan model ECM tidak bisa dilakukan. Sebab dalam uji ECM data harus signifikan pada tingkat level. Maka persamaan regresi $Y_t = \alpha + \beta X_t + e_t$ disebut persamaan regresi kointegrasi dan parameter β dapat diinterpretasikan sebagai *long-run* multiplier yang mengukur pengaruh jangka panjang (*long-run effect*) secara permanen dari X_t terhadap variabel Y_t .

Berikut persamaan kointegrasi dalam penelitian ini, yaitu:

$$PE_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t + e_t \dots (1)$$

Keterangan:

PE_t : Pertumbuhan Ekonomi Periode t

INF_t : Inflasi Periode t

PKP_t : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode t

HLN_t : Hutang Luar Negeri Periode t

PS_t : Pembiayaan Syariah Periode t

$\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Kointegrasi

Kriteria uji kointegrasi data:

- a. H_0 : Ada kointegrasi
 H_a : Tidak ada kointegrasi
- b. Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- c. Statistik uji : nilai ADF
- d. Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai ADF > Critical Value ($\alpha = 5\%$)
- e. Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai ADF < Critical Value ($\alpha = 5\%$)

Berikut ini adalah hasil uji kointegrasi yang sudah dilakukan peneliti terhadap variabel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Kointegrasi

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.059875	0.0046
Test critical values:		
1% level	-3.724070	
5% level	-2.986225	
10% level	-2.632604	

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan uji ADF pada tabel 4.4 di atas diketahui bahwa *residual* pada persamaan jangka panjang sudah signifikan pada derajat level karena ADF statistik secara absolut lebih besar dari pada *critical value* baik pada 1%, 5% maupun 10% atau dilihat dari probabilitasnya adalah 0,0046 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *residual* tidak mengandung akar-akar unit sehingga pemodelan ECM dalam jangka panjang diestimasi menggunakan regresi OLS dengan eviews 10.

3. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan uji asumsi klasik adalah sebagai syarat dalam metode regresi. Terpenuhinya asumsi ini maka hasil yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi yang digunakan yaitu uji Normalitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi, dan Multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

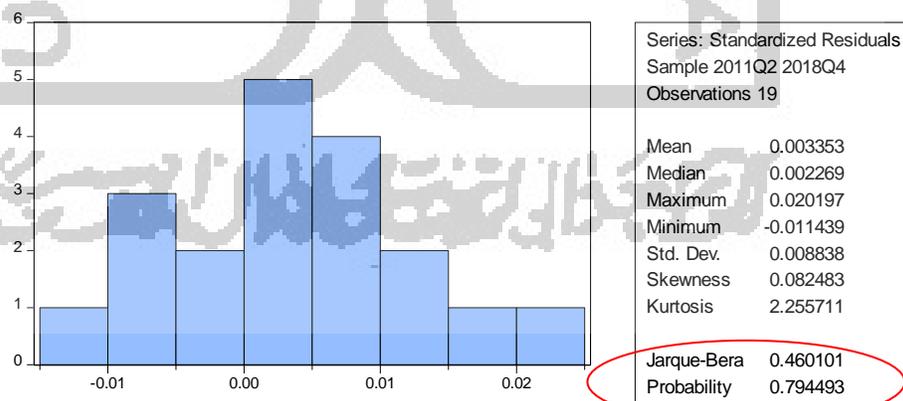
Uji normalitas yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pengujian terhadap *residual* terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan *Jarque-Bera Test* dan nilai Probabilitas, yakni apabila lebih besar dari 0,05. Apabila nilai *Jarque-Bera* dan nilai Probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *residual* terdistribusi normal dan sebaliknya apabila *Jarque-Bera* dan nilai Probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa *residual* terdistribusi normal.

H_0 : *Residual* berdistribusi normal (Probabilitas dan *Jarque-Bera* > 0,05)

H_a : *Residual* tidak berdistribusi normal (Probabilitas dan *Jarque-Bera* < 0,05)

Berikut di bawah ini adalah hasil uji normalitas data:

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,460101 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,794493, artinya lebih besar dari 0,05 ($0,460101 > 0,05$ dan $0,794493 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *residual* terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan data telah terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai varian yang sama atau tidak. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier yaitu dengan melihat nilai Prob. F-statistik (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi sebaliknya apabila lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.

H_0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik $> 0,05$)

H_a : Terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik $< 0,05$)

Berikut dilampirkan hasil uji heteroskedastisitas, yaitu:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.285579	Prob. F(5,13)	0.3281
Obs*R-squared	6.286323	Prob. Chi-Square(5)	0.2793
Scaled explained SS	4.067510	Prob. Chi-Square(5)	0.5397

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas diketahui nilai Prob. F hitung sebesar 0,3281 yakni lebih besar dari 0,05 ($0,3281 > 0,05$). Sehingga disimpulkan H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak bisa menggunakan uji LM (*Lagrange Multiplier*), yaitu salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier. Pada uji LM terjadi atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai probabilitas F hitung, yakni harus lebih besar dari 0,05.

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi (Probabilitas F-statistik $> 0,05$)

H_a : Terjadi autokorelasi (Probabilitas F-statistik $< 0,05$)

Di bawah ini adalah hasil uji autokorelasi data penelitian, yaitu:

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	510.9943	Prob. F(2,11)	0.0000
Obs*R-squared	18.79767	Prob. Chi-Square(2)	0.0001

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi di atas menggunakan uji LM (*Lagrange Multiplier*) diketahui nilai probabilitas F hitung sebesar 0,0000,

artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga disimpulkan data linier terjadi autokorelasi. Oleh karena terjadi autokorelasi pada data statistik, maka dilakukan penyembuhan dengan metode *Cochrane-Orcut* (ar(1) dan ar(2)), yaitu hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Metode *Cochrane-Orcut*

R-squared	1.000000	Mean dependent var	5.464063
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	0.618968
S.E. of regression	5.82E-16	Sum squared resid	7.80E-30
F-statistic	4.38E+30	Durbin-Watson stat	2.003378
Prob(F-statistic)	0.000000		
Akaike info criterion	-67.25406		
Hannan-Quinn criter.	-67.11741		

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Ada tidaknya autokorelasi dilihat dari nilai uji *Durbin-Waston*, yaitu diperoleh nilai DW hitung sebesar 2,003378, nilai DU sebesar 1,7323 dan nilai 4-DU sebesar 6,9292. Adapun ketentuan pengujian autokorelasi pada *Durbin-Waston* yaitu: $DU < DW < 4-DU$, maka disimpulkan $1,7323 < 2,003378 < 6,9292$. Artinya posisinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dikatakan data linier bebas dari adanya autokorelasi.



Gambar 4.6 Daerah Autokorelasi

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai matrik korelasi (*correlation matrix*) lebih kecil dari 0,85.

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas (*correlation matrix* < 0,85)

H_a : Terjadi multikolinearitas (*correlation matrix* > 0,85)

Berikut di bawah ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

	Inflasi	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	Hutang Luar Negeri	Pembiayaan Syariah
Inflasi	1.000000	0.508884	-0.024970	0.069650
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.508884	1.000000	0.315708	0.503552
Hutang Luar Negeri	-0.024970	0.315708	1.000000	0.468083
Pembiayaan Syariah	0.069650	0.503552	0.468083	1.000000

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.9 di atas diketahui nilai matrik korelasi (*correlation matrix*) multikolinearitas penelitian kurang dari

0,85. Karena nilai matrik korelasi dari keempat variabel independen tidak ada yang lebih dari 0,85, dengan demikian variabel di atas telah terbebas dari adanya multikolinearitas.

D. Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM). Pendekatan ECM digunakan untuk menjelaskan parameter jangka pendek dan jangka panjang. Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka panjang:

$$PE_t = \alpha_0 + \alpha_1 INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t$$

Keterangan:

PE_t : Pertumbuhan Ekonomi periode t

INF_t : Inflasi periode t

PKP_t : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode t

HLN_t : Hutang Luar Negeri periode t

PS_t : Pembiayaan Syariah periode t

$\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Panjang

Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$DPE_t = \alpha_1 DINF_t + \alpha_2 DPKP_t + \alpha_3 DHLN_t + \alpha_4 DPS_t + RES(-1)$$

Keterangan:

DPE_t : Perubahan Pertumbuhan ekonomi Periode t

$DINF_t$: Perubahan Inflasi Periode t

$DPKP_t$: Perubahan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Periode t

$DHLN_t$: Perubahan Hutang Luar Negeri Periode t

DPS_t : Perubahan Pembiayaan Syariah Periode t

$\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Pendek

Kriteria pengujian *Error Correction Model* (ECM):

- a. H_0 : Signifikan
 H_a : Tidak signifikan
- b. Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- c. Statistik uji : nilai Probabilitas F statistik (F hitung)
- d. Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai Probabilitas > Critical Value ($\alpha = 5\%$)
- e. Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai Probabilitas < Critical Value ($\alpha = 5\%$)

Pengujian hipotesis pertama menggunakan model ECM jangka panjang, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.000307	0.000348	0.882926	0.3851
Hutang Luar Negeri	-0.001108	0.000428	-2.590959	0.0152
Inflasi	-0.124837	0.148738	-0.839307	0.4087
Pembiayaan Syariah	-0.006860	0.001201	-5.713453	0.0000
C	7.152866	0.219908	32.52660	0.0000
R-squared	0.729081			
Adjusted R-squared	0.688945			
F-statistic	18.16523			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 maka diperoleh model ECM jangka panjang sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 PE_t &= \alpha_0 + \alpha_1 INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t \\
 &= 7,152866_C - 0,001108_INF + 0,000307_PKP - 0,001108_HLN - \\
 &\quad 0,006860_PS
 \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 7,152866 artinya jika nilai Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah = 0, maka besarnya pertumbuhan ekonomi adalah 7,152866. Adapun pengukuran menggunakan tingkat signifikansi 5%, dapat dianalisis pada tabel di atas ada dua variabel yang signifikan yaitu Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Inflasi tidak signifikan secara statistik.

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil tersebut di atas pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,4087 atau lebih besar dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan. Berdasar pada hasil uji tersebut maka H_0 ditolak karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,4087 > 0,05$) atau data tidak signifikan secara statistik. Sementara diketahui nilai koefisien sebesar -0,124837, di mana jika nilai koefisien bernilai negatif maka artinya inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi naik 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124837, sebaliknya jika tingkat inflasi turun sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124837. Sehingga disimpulkan hipotesis 1 diterima dan inflasi bisa digunakan sebagai model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 1: inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil di atas mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, hasil tersebut diperoleh dari nilai probabilitas sebesar 0,3851 atau lebih besar dari 0,05 yang di mana kriteria uji penelitian mengatakan apabila nilai probabilitas

lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan dan ada pengaruh, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan dan tidak ada pengaruh. Karena hasil yang disebutkan di atas lebih besar dari 0,05 ($0,3851 > 0,05$) maka H_0 ditolak atau data tidak signifikan secara statistik sehingga artinya dalam jangka panjang inflasi tidak mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai koefisien sebesar 0,000307, artinya jika pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000307 dan sebaliknya jika pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000307. Disimpulkan hipotesis 2 ditolak, sehingga pengeluaran konsumsi pemerintah tidak bisa digunakan sebagai model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 2: pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hutang luar negeri berdasarkan hasil estimasi jangka panjang mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0152 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria uji dalam penelitian ini yaitu jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya data tidak signifikan secara statistik. Karena nilai probabilitas yang sudah disebutkan di

atas lebih kecil dari 0,05 ($0,0152 < 0,05$), maka disimpulkan bahwa H_0 diterima atau data signifikan, yang berarti ada pengaruh antara hutang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi. Diketahui nilai koefisien sebesar -0,001108 yang di mana karena nilai koefisien bertanda negatif maka artinya pengaruh yang diberikan adalah negatif. Artinya apabila hutang luar negeri meningkat sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001108, sebaliknya apabila hutang luar negeri menurun 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001108. Disimpulkan hipotesis 3 ditolak, sehingga variabel hutang luar negeri tidak bisa dijadikan model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 3: hutang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan syariah mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, di mana kriteria uji dalam penelitian ini yaitu apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan. Karena hasil uji di atas lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka disimpulkan H_0 diterima atau data signifikan secara statistik, yaitu ada pengaruh antara pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Diketahui nilai koefisien sebesar -0,006860, karena nilai koefisien bertanda negatif maka pengaruh yang diberikan pembiayaan syariah adalah negatif.

Artinya apabila pembiayaan syariah meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006860 dan apabila pembiayaan syariah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001108. Sehingga disimpulkan hipotesis 4 ditolak dan variabel pembiayaan syariah tidak bisa dijadikan model jangka panjang dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 4: pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Diketahui pada model ECM jangka panjang, nilai Adjusted R-squared adalah sebesar 0,688945 yang artinya variabel inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 68,89 persen. Sedangkan sisanya 31,11 persen adalah variabel lain di luar model. Nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa variabel independen dalam dalam jangka panjang seperti inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hasil estimasi Model Korelasi Kesalahan (ECM) dalam jangka pendek ditunjukkan oleh hasil di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.015050	0.045612	-0.329958	0.7467
D(Inflasi)	0.053583	0.044114	1.214633	0.2461
D(Pengeluaran Konsumsi Pemerintah)	0.000200	0.000129	1.540977	0.1473
D(Hutang Luar Negeri)	0.006415	0.002180	2.941941	0.0114
D(Pembiayaan Syariah)	4.73E-05	0.004196	0.011281	0.9912
ECT(-1)	-0.538221	0.120958	-4.449653	0.0007
R-squared	0.897247			
Adjusted R-squared	0.857727			
F-statistic	22.70342			
Prob(F-statistic)	0.000005			

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 maka diperoleh model ECM jangka pendek sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 DPE_t &= \alpha_1 DINF_t + \alpha_2 DPKP_t + \alpha_3 DHLN_t + \alpha_4 DPS_t ECT(-1) \\
 &= -0,015050_C + 0,0,053583_DINF + 0,000200_DPKP + 0,006415_DHLN \\
 &\quad + 0,47305_DPS (-0,538221)_ECT
 \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar -0,015050 menunjukkan angka negatif. Ini memberikan makna bahwa tanpa pergerakan tingkat inflasi, intervensi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri, dan pengalokasian pembiayaan pada bank syariah dalam jangka pendek maka pertumbuhan ekonomi cenderung tertekan. Hasil estimasi pada tabel 4.11 di atas menunjukkan hanya ada satu variabel yang signifikan yaitu Hutang Luar Negeri, sedangkan Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Pembiayaan Syariah tidak signifikan secara statistik.

1. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi seperti terlihat pada tabel 4.11 di atas mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,4261 atau lebih besar dari 0,05, di mana kriteria uji penelitian menyebutkan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan. Karena nilai probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 ($0,4261 > 0,05$) maka H_0 ditolak atau data tidak signifikan secara statistik. Adapun koefisien inflasi sebesar 0.053583 berarti apabila inflasi meningkat 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.053583. Ini berarti juga terjadinya kenaikan harga barang dan jasa di pasar tidak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia pada periode tertentu. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka hipotesis 1 tolak, sehingga variabel inflasi tidak bisa dijadikan model jangka pendek dalam penelitian ini sebagaimana bunyi hipotesis 1: inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tabel 4.11 di atas mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,1473 atau lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan H_0 ditolak atau data tidak signifikan. Artinya tidak ada pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan tersebut dilihat dari kriteria uji penelitian yaitu apabila nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan secara statistik. Adapun nilai koefisien sebesar 0,000200, berarti apabila pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000200 dan apabila pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000200. Oleh karena itu hipotesis 2 ditolak dan variabel pengeluaran konsumsi pemerintah tidak bisa dijadikan model jangka pendek dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 2: pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hutang luar negeri dalam jangka pendek pada tabel 4.11 di atas mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0114 atau lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria uji penelitian adalah apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima atau data signifikan, yang artinya ada pengaruh, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0114 < 0,05$) maka H_0 diterima atau ada pengaruh antara hutang luar negeri dengan pertumbuhan ekonomi. Maksud nilai koefisien sebesar 0,006415, yaitu apabila hutang luar negeri meningkat 1 persen maka akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006415 dan apabila hutang luar negeri menurun 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006415. Sehingga disimpulkan hipotesis 3 diterima dan variabel hutang luar negeri bisa dijadikan model jangka pendek dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 3: hutang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dibuktikan dari nilai probabilitas pada tabel 4.11 sebesar 0,9912 atau lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau data tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh antara pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan tersebut di atas mengacu pada kriteria uji yang menyebutkan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima artinya data signifikan, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 artinya data tidak signifikan secara statistik. Adapun nilai koefisien sebesar 4,7305 berarti apabila pembiayaan syariah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7305. Sebaliknya apabila pembiayaan syariah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7305. Sehingga hipotesis 4 ditolak dan pembiayaan syariah tidak bisa dijadikan model jangka pendek dalam penelitian ini, sebagaimana bunyi hipotesis 4: pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi pada tabel 4.11 didapat koefisien variabel ECT (*Error Correction Term*) yaitu sebesar -0,0538221 yang mempunyai makna bahwa perbedaan antara tingkat pertumbuhan dengan nilai 1 tahun. Koefisien ECT ini digunakan untuk mengukur respon *regressand* setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2009), koefisien ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai ECT sebesar -0,0538221 dengan probabilitas 0,0007 yang berarti signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen sehingga model ECM dalam jangka pendek adalah valid atau cukup baik.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,857727 yang mempunyai arti bahwa sebesar 85,77 persen variasi variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah. Sedangkan sisanya sebesar 14,23 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000005 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

E. Pembahasan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil uji yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa dalam jangka pendek variabel inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila tingkat inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi juga

akan naik. Hasil tersebut di atas mengindikasikan bahwa tingkat inflasi mampu menjadi tolok ukur dalam menilai perekonomian suatu negara dalam batas tertentu. Menurut penelitian Susanto dan Rachmawati (2013) yang dijadikan dasar oleh Herman Ardiansyah (2017), bahwa kenaikan tingkat inflasi yang masih dalam tingkatan ringan bisa memberikan stimulus pada produsen untuk meningkatkan produksinya. Sesuai dengan hukum penawaran, jika tingkat harga naik penawaran akan naik, hal inilah yang membuat produsen menaikkan hasil produksinya. Ketika barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan harga masih terjangkau oleh konsumen karena tingkat inflasi masih dalam tingkat rendah maka daya beli konsumen tidak akan menurun, sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun tingkat inflasi meningkat.¹³

Akan tetapi dalam jangka panjang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan teori Keynes yang menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana keistimewaan teori ini adalah di dalam jangka pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat (AS) adalah positif. Kurva AS positif maka harga naik dan *output* juga naik. Selanjutnya hubungan yang secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Oleh karena itu, menekan tingkat inflasi menjadi penting untuk

¹³ Herman Ardiansyah, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol 5, No. 3, Tahun 2017, hlm. 4.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetap menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah adalah langkah yang harus dilakukan setiap negara dalam menjaga kestabilan perekonomian.

Adapun laju inflasi Indonesia mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan perekonomian. Indonesia mencatat beberapa periode dengan inflasi tinggi bahkan tergolong hiperinflasi, salah satunya di tahun 1960-an dengan rata-rata sebesar 294%. Inflasi yang tinggi pada periode tersebut disebabkan kebijakan defisit anggaran Pemerintah, sehingga meningkatkan jumlah uang beredar dan pada gilirannya mendorong laju inflasi.¹⁴

Pada akhir 1960 dan akhir 1990, Indonesia mengalami periode inflasi yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 10-12% per tahun, kecuali pada saat *shock* eksternal. Di antara periode tersebut, tercatat 3 peristiwa *shock* eksternal dan dua di antaranya karena kenaikan harga minyak dunia yaitu tahun 1973-1974 dan tahun 1979-1980. *Shock* eksternal selanjutnya adalah krisis keuangan Asia pada 1997-1999. Pada saat puncak krisis di 1998, inflasi Indonesia tercatat sebesar 60%. Pada saat itu tidak terjadi hiperinflasi karena pemerintah pada akhirnya melakukan kebijakan stabilitas perekonomian yang didukung IMF.¹⁵

Laju periode sesudah krisis, inflasi yang cukup tinggi terjadi di tahun 2000-2001, 2005-2006 dan 2008. Tingginya inflasi pada periode awal sesudah krisis diduga banyak dipengaruhi kondisi sosial politik yang belum stabil

¹⁴ G.A. Diah Utari, "Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan Pengendaliannya", *Bank Indonesia Institute*, (Tahun 2016), hlm. 28.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29.

sehingga mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Laju inflasi tahun 2005 merupakan laju inflasi tertinggi dalam periode sesudah krisis, yaitu sebesar 17,1%. Laju inflasi tahun 2008 juga tercatat *double digit* yaitu sebesar 11,1% dan merupakan laju inflasi tertinggi kedua setelah 2005. Tingginya laju inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga minyak dan pangan dunia.¹⁶

Namun sejak periode 2010-2015, perkembangan inflasi IHK (*headline inflation*) di Indonesia relatif terkendali, meskipun terdapat dua kali kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah. Inflasi IHK berada pada posisi tertinggi di Agustus 2013 sebesar 8,50% (yoy), sekitar dua bulan pasca kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah pada 22 Juni 2013. Inflasi IHK kembali meningkat ketika Pemerintah kembali melakukan kebijakan kenaikan harga BBM pada 18 November 2014. Dampak dari kenaikan harga BBM tersebut mencapai puncaknya pada Desember 2014 dengan inflasi IHK mencapai 8,08% (yoy).¹⁷

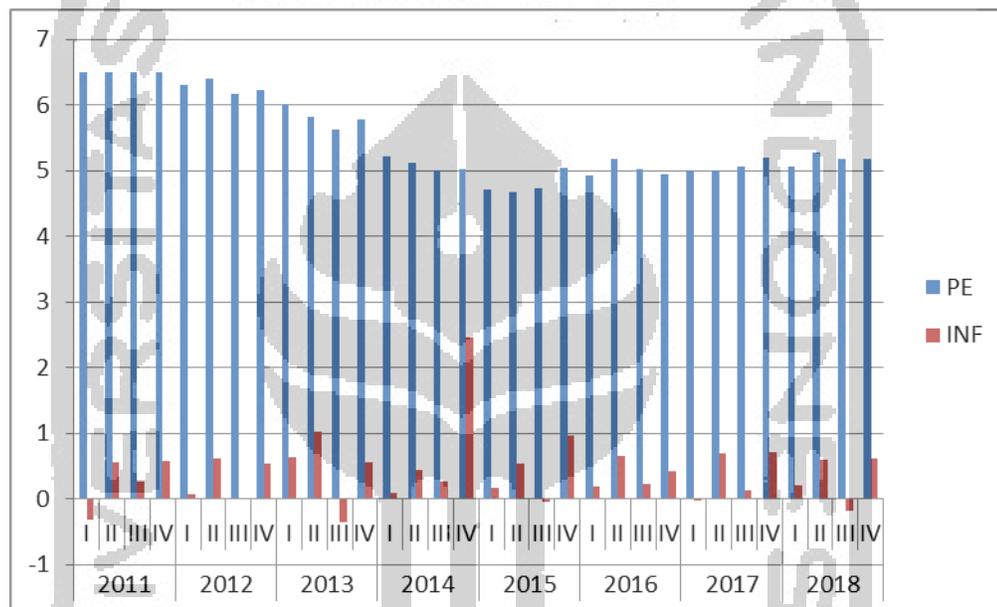
Di tengah gejolak sektor eksternal, inflasi hingga 2018 tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Ditopang inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF) yang terjaga, serta inflasi *administered prices* (AP) yang rendah, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,13% dan berada dalam rentang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30-31.

sasaran $3,5\pm 1\%$. Perkembangan ini juga menjadikan inflasi berturut-turut dalam 4 tahun terakhir berada dalam kisaran sasaran.¹⁸

Adapun perkembangan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.7 Perkembangan Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BI, BPS dan publikasi lainnya diolah

Laju inflasi Indonesia selama periode 2011-2018 secara umum berfluktuasi, tetapi terkendali. Angka inflasi selama tahun 2011-2018 tergolong masih rendah dan di bawah rata-rata tingkat inflasi 10 persen per tahun, maka inflasi tersebut merupakan inflasi ringan. Inflasi Indonesia yang terkendali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siklikal, tetapi juga oleh faktor struktural. Satu sisi, faktor siklikal seperti harga komoditas pangan global yang menurun dan permintaan yang terkendali mempengaruhi tekanan inflasi yang terus terkendali.

¹⁸ Bank Indonesia, hlm. xxxiii

Sisi lain, perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia juga berpengaruh positif dan menimbulkan dampak permanen pada inflasi yang makin rendah. Faktor struktural tersebut terkait kebijakan moneter yang konsisten, struktur pasar yang kompetitif dan informasi pasar yang makin baik, serta distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah pusat dan daerah yang makin erat juga berkontribusi pada perbaikan karakter inflasi tersebut. Perbaikan struktur inflasi pada gilirannya mempengaruhi perilaku inflasi seperti ekspektasi yang semakin rendah, dampak lanjutan kenaikan inflasi VF dan AP terhadap inflasi inti yang makin rendah, serta dampak pelemahan kurs terhadap inflasi yang menurun sehingga hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia.¹⁹

Terkendalnya tingkat inflasi memberi dampak positif bagi perekonomian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya inflasi yang terkontrol akan mendorong para pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya. Ketika produksi ditambah, jelas akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Bertambahnya faktor produksi akan merangsang jumlah *output* yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana *output* bertambah maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Sebaliknya jika inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakstabilan perekonomian negara, yaitu penurunan daya beli masyarakat dan ketidakmampuan para produsen atau industri dalam memenuhi faktor produksi

¹⁹ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), hlm. 62.

mereka dikarenakan harga-harga yang tidak terkendali. Penurunan tingkat produksi juga menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Permasalahan inflasi seperti yang disebutkan di atas juga diakui oleh ekonomi Islam dan salah satu penyebab inflasi yang disebutkan oleh Al-Maqrizi adalah *human error inflation* atau inflasi karena kesalahan manusia. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh manusia yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Buruknya administrasi dapat dilihat pada krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Kekacauan politik di Indonesia berimplikasi pada peningkatan harga-harga dalam sektor ekonomi yang dampaknya pada penurunan ekonomi di berbagai sektor.

Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, tingginya inflasi (*hyper inflation*) yang menimpa Indonesia juga terjadi tahun 1997-an merupakan krisis moneter yang tidak terlepas dari ulah spekulasi mata uang di bursa valas. Akibat adanya spekulasi di bursa valas, nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Sehingga bagi negara yang banyak memiliki hutang luar negeri, terjadinya depresiasi nilai tukar ini akan lebih membahayakan ekonominya. Bordo, Meissner & Weidenmier (2006) dalam penelitian Kuni Zakiyah (2018) mengatakan negara yang hutang luar negerinya banyak dalam mata uang asing, sedangkan arus pendapatan terbesarnya dalam mata uang lokal, akan mengalami keadaan yang disebut dengan *currency mismatches* (ketidaksepakatan mata uang). Ketidaksepadanan mata uang tersebut dapat membuat negara menjadi lebih peka (*vulnerable*) terhadap terjadinya depresiasi mata uang. Jika mata uangnya

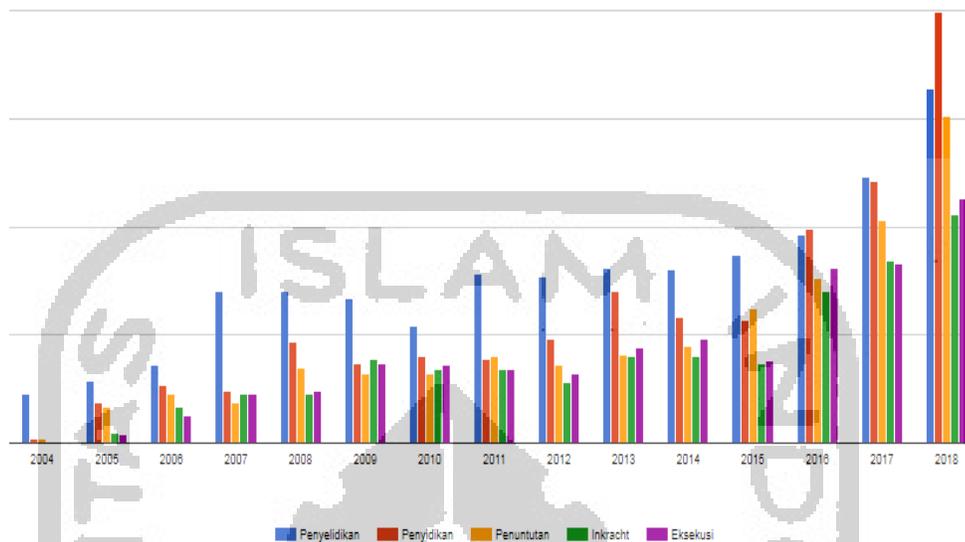
mengalami depresiasi secara mendadak, maka kondisi keuangannya akan segera terguncang dan pada akhirnya menimbulkan krisis keuangan.²⁰

Dengan demikian, jika kita merujuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, maka faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya gejala nilai mata uang harus ditekan seminimal mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga keberadaan transaksi valuta asing yang dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat seharusnya segera dihilangkan, sebab kenyataannya praktik tersebut lebih menumbuhsurkan spekulasi yang berujung pada terjadinya guncangan nilai tukar mata uang, di mana dampaknya dapat menghancurkan ekonomi sektor *rill* yang ditandai dengan tingginya inflasi.²¹

Namun persoalan yang juga perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia sekarang ini sebagaimana disinggung oleh Al-Maqrizi di atas adalah kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:

²⁰ Kuni Zakiyah, "Peran Pengendalian Inflasi dalam Tinjauan Perspektif Al-Qur'an", *The International Journal Of Applied Business (TIJAB)*, Vol. 2, No. 1, (April 2018), hlm. 26-27.

²¹ *Ibid*, hlm. 27.



Gambar 4.8 Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
 Sumber: <http://www.acch.kpk.go.id>

Dalam sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi di mana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan risiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan dunia perdagangan. Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien. Dampak negatif lainnya, korupsi telah menimbulkan distorsi pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat di mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Myrdal (1968) dalam penelitian Sri Nawatmi (2016) menyebutkan bahwa pejabat yang korupsi bisa menggunakan

kekuasaannya untuk menunda dan menghalangi suatu proyek yang akibatnya pada ketidakstabilan perekonomian negara.²²

Merujuk kepada al-Qur'an, maka di dalamnya terdapat ayat yang memberi informasi tentang akan terjadinya ketidakstabilan atau bahkan kegoncangan ekonomi, jika manusia melakukan kesalahan dalam menjalankan praktik ekonomi.²³ Hal tersebut disinggung dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”²⁴ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Peneliti tidak menemukan banyak penelitian yang membahas pengaruh positif inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun ada beberapa penelitian menemukan hasil yang sama di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Berlian Karlina (2017) yang menganalisis tentang pengaruh inflasi, indeks harga

²² Sri Nawatami, “Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Empiris Negara-Negara Asia Pasifik”, *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 31, No. 1, (Januari 2016), hlm. 16.

²³ Kuni Zakiyah, hlm. 22.

²⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 69.

konsumen terhadap PDB di Indonesia pada tahun 2011-2015.²⁵ Dalam penelitiannya dia menjelaskan variabel inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2011-2015.

Penelitian Anidiobu, G.A., dkk (2018)²⁶ juga menemukan hasil yang sama yaitu bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan ditemukan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran konsumsi pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, apabila pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya apabila pengeluaran konsumsi pemerintah menurun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

²⁵ Berlian Karlina, “Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks Harga Konsumen Terhadap PDB Indonesia pada Tahun 2011-2015”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, (April 2017), hlm. 16-27.

²⁶ Anidiobu, G.A., dkk, “Analysis of Inflation and Its Effect on Economic Growth in Nigeria”, *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Februari 2018), hlm. 28-36.



**ambar 4.9 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan
Pertumbuh Ekonomi**
Sumber: BPS dan publikasi lainnya diolah.

Gambar 4.9 di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2018 kontribusi yang diberikan cenderung menurun yang digambarkan oleh grafik berwarna merah.

Dalam publikasi The World Bank (2016) menegaskan bahwa anggaran belanja pemerintah seharusnya dikelola melalui kebijakan prioritas seperti: peningkatan anggaran kesehatan dan kelanjutan pendanaan pendidikan, investasi lebih besar pada infrastruktur, dan peningkatan cakupan bantuan sosial, manfaat dan jaminan sosial untuk semua orang.

Hal utama yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah alokasi belanja negara yang tepat. Indonesia sejak dulu telah menghabiskan

banyak biaya untuk kebijakan yang dampaknya paling kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti subsidi dan impor, yang mana sedikit biaya untuk kebijakan yang memberi efek paling besar, contohnya program bantuan sosial seperti PKH (sejenis bantuan tunai bersyarat), BSM (sekarang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yaitu program beasiswa untuk murid miskin), dan kesehatan.

Rencana alokasi ulang subsidi BBM untuk investasi lebih besar pada infrastruktur juga sangat penting. Anggaran belanja infrastruktur dapat meningkatkan akses pada pelayanan publik. Seperempat populasi Indonesia berada di perkotaan dan lebih dari separuh penduduk pedesaan kurang memiliki akses transportasi. Manfaat perbaikan transportasi berlipat ganda: meningkatkan akses pada pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan. Selain itu, akan mengurangi biaya transportasi sehingga meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Masalah transportasi adalah kendala besar bagi industri manufaktur. Mengurangi kendala ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing, membantu menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, serta mendekatkan produsen lokal bahan mentah ke pasar domestik. Sebab Indonesia diperkirakan kehilangan lebih dari 1 poin persentase pertumbuhan PDB tambahan per tahun karena kurangnya investasi pada infrastruktur, khususnya transportasi. Dengan menghilangkan kendala ini, maka serapan tenaga kerja akan lebih banyak, pendapatan dan konsumsi rumah tangga meningkat. Artinya, sumber daya fiskal untuk belanja

Pemerintah pada program sosial pun meningkat, yang akhirnya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun menariknya perekonomian yang ditopang oleh impor memiliki jumlah yang lebih tinggi dibanding jumlah ekspor. Tercatat pada tahun 2018 jumlah ekspor Indonesia sebesar 180.059,2 juta dolar AS atau sekitar 609.291,7 ton. Sementara total impor Indonesia pada tahun 2018 mencapai 188.625,6 juta dolar AS atau 171.623,0 ton. Angka tersebut menunjukkan, jumlah barang masuk ke Indonesia lebih banyak dibanding *output* yang dihasilkan di dalam negeri. Impor yang tinggi akan memberi dampak negatif bagi perekonomian dalam negeri. Ini disebabkan devisa negara akan berkurang karena pemerintah harus membayar kepada negara eksportir termasuk membayar pajak impor.

Perilaku impor yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi produktivitas di dalam negeri. Hal tersebut sejalan dengan teori perdagangan internasional, apabila jumlah barang impor semakin naik maka produktivitas di dalam negeri akan menurun. Jika produktivitas dalam negeri semakin menurun yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena ketika barang impor membanjiri pasar di Indonesia masyarakat akan cenderung lari kepada barang impor, perilaku masyarakat yang demikian menjadikan lemahnya sektor industri dalam negeri. Dampak akhirnya pada penurunan jumlah *output* yang dihasilkan, *output* menurun maka pertumbuhan ekonomi menurun. Dalam ekonomi komposisi nilai ekspor harus lebih tinggi dibanding nilai impor sesuai dengan rumus dalam menghitung pengeluaran *agregate* yaitu $Y = C + I + G + (X$

– M). Berikut di bawah ini perkembangan nilai ekspor-impor Indonesia tahun 2011-2018, yaitu:

Tabel 4.12 Perkembangan Nilai Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2011-2018

(Juta USD)

Tahun	Ekspor	Impor
2011	203.616,7	177.299,3
2012	190.020,3	191.689,5
2013	182.551,8	186.628,7
2014	176.292,7	178.178,8
2015	150.366,3	142.694,8
2016	144.433,5	135.650,7
2017	168.828,2	156.985,5
2018	180.059,2	188.625,6

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2011-2018

Tantangan dalam hal tata kelola pemerintahan juga menjadi hambatan utama dalam pemberian layanan publik secara efisien, terutama tingkat daerah. Ada perbedaan kinerja yang ekstrem di antara berbagai tingkat pemerintahan dan di antara berbagai daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh Pemerintah yang ada di daerah, banyak Pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membelanjakan seluruh alokasi anggaran tahunnya karena pengeluaran Pemerintah pusat untuk daerah dialokasikan langsung ke tiga tingkat pemerintahan daerah: provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Kecamatan didanai dan dikelola di bawah kabupaten/kota. Belum optimalnya pengelolaan transfer dana daerah oleh Pemerintah pusat mengecewakan bagi konstituen, termasuk dunia usaha setempat, dan menghambat Pemerintah pusat baik dalam upaya mengejar

prioritas nasional seperti meningkatkan infrastruktur dan juga untuk memberikan stimulus fiskal pada masa perlambatan ekonomi saat ini.²⁷

Hal ini semakin mempertegas pentingnya meningkatkan kapasitas, terutama melalui pelatihan. Upaya-upaya tersebut hendaknya ditujukan bagi daerah yang memang memerlukannya, termasuk daerah yang mendapat peringkat rendah dalam pemerintahan dan daerah yang kesulitan dalam membelanjakan alokasi anggaran atau dalam melaporkan data statistik. Selain itu, memberantas korupsi akan sangat membantu. Secara khusus, memperluas penggunaan pengadaan secara elektronik akan membatasi penyuapan dan juga berpengaruh positif terhadap mutu dan kesesuaian ukuran proyek pemerintah. Banyaknya anggaran yang dikorupsi menghambat pembangunan nasional.²⁸

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari APBN dengan porsi target belanja 20% dari seluruh APBN, namun capaian yang diperoleh masih buruk akibat kurangnya tujuan yang berkaitan dengan kinerja. Sistem pendidikan semestinya belajar dari hasil kajian atas program sertifikasi guru, yang telah menghasilkan naiknya pencapaian gelar pendidikan bagi guru baru, namun justru meningkatkan pengeluaran untuk gaji guru dan tak banyak meningkatkan mutu pengajaran. Fokus di bidang pendidikan harus perlahan-lahan dialihkan ke pendidikan tingkat menengah karena tingkat inilah yang lebih mengalami

²⁷ OECD, hlm. 31.

²⁸ *Ibid*, hlm. 32.

kekurangan pendanaan menurut standar internasional, terutama bagi kelompok yang paling miskin.²⁹

Kaitannya dengan pendidikan, Islam juga menegaskan bahwa negara harus menjamin pendidikan dengan menyediakan tenaga pengajar (guru/dosen), tempat pendidikan dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya. Jaminan akan pendidikan ini juga termasuk jaminan hidup yang layak bagi para guru. Pada masa Khalifah ‘Umar ibn al-Khattab, seorang guru diberi gaji 15 dinar setiap bulannya. Di jaman kejayaan Islam dulu, sumber-sumber ekonomi terutama dari sumber daya alam, juga produksi barang dan jasa serta perkembangan sains dan teknologi belum semaju dan sebanyak seperti sekarang ini. Akan tetapi jaminan pendidikan gratis dengan berbagai fasilitasnya, serta taraf hidup para guru jauh lebih baik pada masa Islam dibandingkan masa hegemoni ekonomi Kapitalis sekarang. Karena terpenuhinya hak pendidikan menjadi modal dasar bagi seseorang mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, serta untuk meningkatkan kekayaannya. Lebih penting melalui pendidikan tercetak sumber daya manusia yang handal sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam perekonomian.³⁰

Secara khusus, belanja publik untuk bantuan sosial (kurang dari 1% PDB) masih sangat rendah, bahkan jika dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya (1,4% di India; 2,1% di Cina; 2,8% di Brazil; dan 3,1% di

²⁹ *Ibid*, hlm. 33.

³⁰ Lilik Rahmawati, hlm. 456.

Afrika Selatan), sementara kemiskinan masih relatif banyak dijumpai. Keadaan ini menjustifikasi perluasan skema bantuan tunai bersyarat, termasuk mengganti program bantuan langsung tunai (tanpa syarat) yang ada, yang cenderung berkotak-kotak dan tidak mencapai sasaran dengan baik.³¹

Permasalahan bantuan sosial, Islam menegaskan dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hokum-Nya”. (Q.S. Al-Hasyr: 7)³²

Ayat tersebut secara tersurat menyinggung terkait belanja negara, bahwa pendapatan negara harus didistribusikan secara merata, sehingga tercipta keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan bantuan sosial harus

³¹ *Ibid.*

³² Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 916.

menjadi perhatian pemerintah sehingga terwujud kemakmuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah bisa menjadi lumbung modal bagi masyarakat dalam membangun roda perekonomian, yang misalnya adalah untuk membuka usaha. Semakin besar kontribusi usaha yang diberikan oleh sektor-sektor ekonomi akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu konsep pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan sosial yang bisa diterapkan dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia adalah zakat. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah Islam zaman Rasulullah SAW seperti yang diungkap oleh Lilik Rahmawati (2008) pada tabel 2.3 yaitu penyaluran zakat dan *'ushur* kepada yang berhak menerimanya. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Sehingga diharapkan konsep yang ditawarkan oleh Islam mampu menjadi alternatif bagi sistem ekonomi pasar yang ternyata menunjukkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya.³³

Tujuan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019 melibatkan komitmen fiskal yang besar. Kenyataannya, tambahan yang dibutuhkan dapat mencapai hingga 2% PDB di tahun 2020, tanpa mempertimbangkan kenaikan yang diperkirakan akan terjadi seiring perkembangan ekonomi dan upaya mengejar capaian kesehatan. Yang paling

³³ Gempito, hlm. 36.

perlu diatasi adalah kurangnya jumlah tempat tidur rumah sakit, terutama di Pulau Jawa, dan kurangnya dokter. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan investasi di bidang kesehatan.³⁴

Uraian permasalahan-permasalahan di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah belum mampu menjadikan pengeluaran konsumsi pemerintah sebagai basis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, serta disimpulkan rancangan anggaran belanja pemerintah belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal Islam.

Peneliti tidak menemukan banyak penelitian yang membahas pengaruh negatif pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naftaly Giosore, dkk (2014)³⁵, yang menyatakan bahwa belanja Pemerintah dalam sektor pendidikan dan pertanian tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, hutang luar negeri diketahui dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika hutang luar negeri meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika hutang luar negeri menurun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka pendek hutang luar negeri mempunyai pengaruh positif

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Naftaly Giosore, dkk, "Effect Government Expenditure on Economic Growth in East Africa: Disaggregated Model", *European Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8, (November 2014), hlm. 289-304.

terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya hutang luar negeri menyebabkan pertambahan *output* di dalam negeri.

Kendati hutang luar negeri dalam jangka pendek berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kontribusi pengaruh yang diberikan masih terbilang rendah yaitu sebesar 0,006415. Hutang jangka pendek adalah hutang yang memiliki jatuh tempo selama 12 bulan, jadi dalam waktu 12 bulan hutang harus dibayarkan. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Karena negara harus membayar dalam waktu singkat atau paling lama hanya satu tahun, maka hutang jangka pendek menjadi hutang yang paling beresiko.

Tujuan utama pemerintah melakukan pinjaman adalah untuk membiayai pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan sebagai konsekuensi dari anggaran defisit yang dianut pemerintah saat ini. Diharapkan hutang yang diterima pemerintah mampu menjadi faktor *leverage* dan tidak hanya untuk menghindari *opportunity cost* akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih yang tidak dapat dipastikan dan diukur besarnya. Sebagai unsur *leverage* seharusnya hutang dilakukan untuk melipatgandakan aset negara, dengan cara menggunakannya untuk membiayai proyek-proyek investasi yang memberikan *return* yang melebihi biaya hutang yang diterima. Suatu hutang dikatakan efektif apabila hutang tersebut mampu menjadi faktor *leverage* pertumbuhan ekonomi atau aset pemerintah. Aset atau pertumbuhan yang

dihasilkan haruslah lebih besar dari biaya hutang yang dikeluarkan (bunga atau kupon Surat Berharga Negara).³⁶

Secara umum, posisi hutang Indonesia masih dapat dikatakan aman, yaitu di mana rasio-rasio hutang pemerintah yang merujuk pada standar *Maastricht Treaty* (rasio hutang terhadap PDB) dan rasio jumlah hutang terhadap jumlah penduduk) dinilai dapat menjaga hutang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik (*manageable*) dan menjamin kesinambungan fiskal. Dibanding dengan beberapa negara berkembang seperti Turki, Filipina, Thailand, Malaysia dan Brazil, dilihat dari statistik Indonesia mempunyai rasio hutang paling rendah yaitu 28,5% terhadap PDB. Sedangkan paling tinggi adalah negara Brazil mencapai 81,2%.

Rasio hutang yang stabil didukung oleh nilai *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN) yang stabil. Dengan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati (*prudent*), SBN yang diperdagangkan di pasar keuangan berhasil menutup defisit APBNP 2017 sejumlah 441,8 triliun rupiah hingga akhir Desember 2018. Kondusifnya kondisi pasar keuangan, semakin mendukung Pemerintah untuk menerbitkan SBN. Selain untuk menutup defisit, SBN juga berperan dalam pembiayaan infrastruktur. Peran SBN dalam pembiayaan infrastruktur secara

³⁶ Venti Eka Satya, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya", *Kajian*, Vol. 20, No. 1, (Maret 2015), hlm. 72.

nyata dapat dilihat dari berbagai proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk), khususnya *Project Financing* Sukuk.³⁷

Hingga akhir tahun 2017 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sanggup menutup hampir 4 kali dari jumlah *outstanding* hutang Pemerintah sejumlah 3.938,7 triliun rupiah atau sekitar 29,2 persen dari PDB. Jumlah tersebut terdiri atas instrument pinjaman sebesar 744,0 triliun rupiah atau 189 persen dari total *outstanding* dan SBN sebesar 3.194,7 triliun atau 81,1 persen dari total *outstanding*.

Dalam portofolio SBN, porsi SBN berdenominasi valas lebih kecil dibandingkan SBN Rupiah, masing-masing 21,7 persen dan 59,4 persen. Di sini lain dalam portofolio pinjaman, porsi pinjaman luar negeri juga relatif rendah sekitar 18,9 persen terhadap total *outstanding*. Hal ini menunjukkan cukup rendah dan masih terjaganya risiko nilai tukar dari portofolio hutang Pemerintah.³⁸

Pada berbagai kajian empiris, hutang luar negeri menunjukkan hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hutang luar negeri sebagai alternatif pembiayaan pembangunan negara akan menambah jumlah tabungan domestik yang tujuannya untuk mengatasi kesenjangan ekspor-impor. Hal ini terjadi karena hutang luar negeri memberikan tambahan devisa

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "APBN Kita Kinerja dan Fakta", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Edisi Januari 2018, dikutip dari <http://www.kemenkeu.go.id/media/6890/apbn-kita-edisi-januari-2018/>, diakses pada Januari 2018, hlm. 37.

³⁸ *Ibid*, hlm. 39.

yang diperlukan negara dikarenakan hasil ekspor yang tidak mencukupi dalam melakukan pembangunan nasional. Bertambahnya tabungan domestik akan memacu investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada APBN tahun 2018 menggambarkan penurunan subsidi energi sebesar -73,0% dialihkan pada peningkatan anggaran sektor produktif seperti infrastruktur sebesar 165,3%, kesehatan 85,9%, dan pendidikan 25,7%. Pembiayaan untuk infrastruktur memiliki jumlah paling tinggi dalam catatan hutang pemerintah, karena difokuskan untuk mendanai beberapa proyek seperti proyek jalan tol, pembangunan jembatan, proyek infrastruktur perkotaan, bandara, proyek perumahan, pembuatan bendungan, dan proyek lainnya yang tercatat sebagai hutang jangka panjang. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan hutang luar negeri yang berjangka panjang tidak memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat sejumlah kajian yang menolaknya, beberapa penelitian juga menyatakan hasil yang sama. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah masih bersifat statis, yaitu penggunaan infrastruktur lebih besar untuk mengangkut barang-barang hasil impor. Artinya sarana transportasi yang telah dibangun lebih besar penggunaannya untuk memperlancar distribusi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Seharusnya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah bersifat dinamis, yaitu merangsang sektor industri dalam negeri. Jika industri dalam negeri berkembang maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Pada sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan hutang luar negeri juga tidak kalah besarnya. Semakin besarnya hutang luar negeri akan semakin memberatkan APBN negara, karena hutang-hutang tersebut harus dibayarkan beserta bunganya melalui APBN. Bahkan dikabarkan 52,42% devisa ekspor habis untuk membayar pokok dan bunga pinjaman investasi dan hutang dagang. Berikut di bawah ini rasio pembayaran pokok dan bunga hutang luar negeri pemerintah terhadap penerimaan ekspor yaitu:³⁹



Gambar 4.9 Rasio Pembayaran Hutang Luar Negeri Terhadap Ekspor
Sumber: Anthony Budiawan, 2018

Pada gambar 4.9 di atas dapat dilihat DSR Tier-1 menunjukkan, pembayaran pokok dan bunga atas hutang jangka panjang dan pembayaran bunga atas hutang jangka pendek. Sedangkan DSR Tier-2 menunjukkan, pembayaran

³⁹ Anthony Budiawan, "Utang Pemerintah Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal", *makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Menyikapi Polemik Utang Pemerintah Indonesia, diselenggarakan oleh Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018, hlm. 6.

pokok dan bunga atas hutang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan hutang dagang kepada non-afiliasi. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa devisa ekspor habis untuk membayar pokok dan bunga pinjaman hutang luar negeri sehingga belum dapat membantu pengembangan sektor ekonomi dalam negeri.

Fakta-fakta di atas memberikan gambaran bahwa hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menjadi faktor *leverage* bagi perekonomian Indonesia dan tidak menciptakan masalah, yang mana menurut Beik (2009) dalam Faishol Luthfi (2018) bahwa hutang mempunyai prinsip tertentu yaitu:⁴⁰

1. Hutang merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk dana secara halal dan tunai mengalami kemandekan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Dalam konteks negara, maka apakah kebijakan hutang yang telah dilakukan pemerintah Indonesia telah memenuhi unsur keterpaksaan atau justru menjadi kebiasaan.
2. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut *ghalabatid dayn* atau terlilit hutang. Hal ini akan menimbulkan efek yang besar yaitu *qahrir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah memanjatkan do'a agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang akan menyebabkan harga diri menjadi hilang. Apalagi, jika yang mengendalikan adalah musuh

⁴⁰ Faisol Luthfi, hlm. 178.

yang mempunyai niat buruk dan kebencian luar biasa. Dalam konteks negara harus dilihat apakah selama ini sudah sesuai dengan kemampuan bangsa.

3. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Dalam konteks makro, terkait dengan hubungan antara negara jika Indonesia berusaha melakukan upaya rescheduling hutang atau bahkan penghapusan hutang maka upaya tersebut adalah hal yang sah-sah saja apalagi ternyata manfaat hutang Indonesia selama ini lebih banyak dinikmati asing. Ekonomi Drajad H. Wibowo mengatakan bahwa 70% manfaat hutang kembali ke kreditur.

Secara sederhana, berdasarkan pada beberapa data di atas apabila dikorelasikan dengan prinsip hutang, bahwasanya dengan adanya prinsip keterpaksaan dalam konteks hutang dalam Islam, maka pemerintah Indonesia harusnya hati-hati dan jangan berhutang di luar kemampuan. Implikasinya seharusnya indikator-indikator hutang luar negeri akan terjaga dan akan berada dalam tahap ambang batas aman.

Bahayanya hutang luar negeri dapat dilihat pada krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tahun 1998. Ketergantungan pada hutang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing menjadikan perekonomian Indonesia mengalami kejutan. Hal ini merupakan dampak dari ketidak mampuan para pelaku bisnis untuk membayar hutang yang berjangka pendek. Sejak tahun 1965 pemerintah memberikan kemudahan bagi para industri untuk melakukan

pinjaman luar negeri yang justru dampaknya sangat mengerikan bagi perekonomian Indonesia. Hutang luar negeri tersebut berpengaruh terhadap politik di Indonesia yang semakin memperparah inflasi, karena lonjatan harga yang terus tidak terkendali. Maka dari itu Islam secara tegas melarang segala bentuk pinjaman berbasis bunga. Bukan saja menjadi beban pemerintah saat ini, akan tetapi bagi generasi mendatang.

Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam dan sebenarnya telah diterapkan oleh pemerintah namun belum maksimal, yaitu pembiayaan dalam bentuk sukuk. Penerbitan sukuk oleh negara pada tahun 2008 menjadi sebuah era baru dalam pengelolaan pembiayaan sekaligus memperkaya instrument fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, peran sukuk oleh negara sebagai instrument fiskal juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerbitan Sukuk Negara yang terus mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2008 penerbitan sukuk oleh negara hanya senilai 4,7 triliun rupiah. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 57,09 triliun rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 75,54 triliun rupiah.⁴¹

Saat ini penerbitan Sukuk Negara tidak hanya untuk pembiayaan defisit umum APBN, tetapi lebih diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini bukan saja sejalan dengan program Kabinet Kerja, tetapi juga sejalan dengan tujuan (*maqashid*) keuangan syariah yang turut menjadi pendorong

⁴¹ Muhammad Ardi, "Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *IQTISHADUNA*, Vol. IX, No. 1, (Juni 2018), hlm. 86.

berkembangnya sektor *rill* dan memberi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi.⁴² Oleh karena itu, pemerintah harus menekan jumlah hutang luar negeri dengan memperbesar investasi di dalam negeri, yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Sukuk Negara yang tujuannya untuk menggaet para investor di dalam negeri sehingga potensi dana yang ada di dalam negeri teralokasikan dengan baik dan dapat mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri.

Selain menerbitkan Sukuk Negara, solusi yang bisa dimaksimalkan oleh Indonesia adalah pajak. Umer Chapra berpendapat bahwa negara-negara Muslim harus menutup defisit anggaran dengan pajak, yaitu mereformasi dengan sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam.⁴³ Pajak merupakan hal penting bagi setiap negara Karena merupakan pendapatan utama bagi negara yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kas negara di samping adanya pendapatan di bidang yang lain. Selain berpengaruh pada pendapatan negara, tentunya pajak pun turut andil dalam mewujudkan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama, meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rosyidin

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhammad Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge, The Islamic Foundation and The International Institut of Islamic Thought*, USA, 1416/1995. Edisi Terj. oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, hlm. 370.

zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak. Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata serta berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak pada dasarnya dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, begitupun penyaluran zakat kepada mustahik terutama fakir dan miski diharapkan dapat menunjang kehidupan ekonominya sehingga dapat membantu bagi pertumbuhan ekonomi nasional.⁴⁴

Adanya pengaruh positif hutang luar negeri dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Paramita Purwanto dan Dewi Restu Mangeswuri (2011), yang menyatakan bahwa hutang luar negeri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Juga penelitian Bagus Aditya Rahman (2017), yang menemukan hasil bahwa utang luar negeri berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia tahun 2005-2014.

Studi lain yang juga dilakukan oleh Syaparuddin, dkk (2015) menyelidiki kasus hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Burma, di mana dengan menggunakan metode regresi data panel, hasilnya menunjukkan peningkatan

⁴⁴ Muhamad Turmudi, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2015), hlm. 128.

hutang luar negeri berakibat pada perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi selama periode 1990-2013 terjadi Indonesia, Malaysia dan Vietnam serta Thailand. Sedangkan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Philipina dan Myanmar.

Selanjutnya Dedi Junaedi (2018) lebih lanjut dalam penelitiannya mengatakan utang luar negeri memiliki korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi (2016) melakukan studi kasus di Indonesia yang diberi judul “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Nilai Produk Domestik Broto (PDB) Indonesia”, dan mendapatkan hasil bahwa utang luar negeri memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terakhir Abdul Malik dan Denny Kurnia (2017) meneliti Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, maka diperoleh hasil bahwa utang luar negeri berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara pada pembiayaan syariah ditemukan hasil bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pembiayaan syariah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun dan sebaliknya apabila pembiayaan syariah menurun maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 4.10 Perkembangan Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: OJK dan publikasi lainnya diolah

Berdasarkan gambar 4.10 di atas dapat dilihat nominal kontribusi yang mampu diberikan oleh bank syariah relatif kecil. Terlihat pada gambar di atas adanya fenomena perlambatan pertumbuhan volume usaha dalam perkembangan di tiga tahun terakhir sehingga pada akhir tahun 2014 hanya mencatat pertumbuhan sebesar 12%.

Rendahnya kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena fokus pembiayaan lebih banyak untuk aktivitas konsumsi bukan untuk aktivitas yang produktif. Dapat dilihat dari total pembiayaan pada bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah* mempunyai total paling tinggi dibanding *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini tercermin dari laporan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jenis Akad Pembiayaan						
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Qard</i>	<i>Istishna'</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Salam</i>
2011	10.229	18.960	56.365	12.937	326	3.839	0
2012	12.023	27.667	88.004	12.090	376	7.345	0
2013	13.625	39.874	110.565	8.995	582	10.481	0
2014	14.354	49.387	117.371	5.965	633	11.620	0
2015	14.820	60.713	122.111	3.951	770	10.631	0
2016	15.292	78.421	139.536	4.731	878	9.150	0
2017	17.090	101.561	150.276	6.349	1.189	9.230	0
2018	15.866	129.641	154.805	7.674	1.609	10.597	0

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2011-2018

Adapun secara spesifik jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan antara pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi. Total nominal pembiayaan pada aktivitas konsumsi lebih tinggi dibanding penggunaan pada modal kerja dan investasi, di mana komposisi modal kerja hanya 105.055 miliar rupiah pada tahun 2018 dan investasi sebesar 75.730 miliar rupiah, sementara konsumsi mencapai 139.408 miliar rupiah. Padahal modal kerja dan investasi dapat menyumbang *output* lebih banyak karena sektor cakupannya adalah sektor produktif, di mana penambahan modal kerja akan memudahkan perusahaan dalam mengembangkan produksinya karena modal kerja diperlukan untuk meningkatkan penjualan sehingga apabila penjualan meningkat maka *output* yang dihasilkan perusahaan juga meningkat. Begitu juga dengan investasi yang memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun

menciptakan lapangan kerja baru. Perbandingan ketiganya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jenis Penggunaan Pembiayaan		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
2011	1.610	428	551
2012	1.671	710	888
2013	2.253	1.021	1.554
2014	4.742	1.854	2.035
2015	79.949	51.690	81.357
2016	87.363	60.042	100.602
2017	99.825	66.848	119.021
2018	105.055	75.730	139.408

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2011-2018

Secara umum perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan syariah terhadap GDP yang masih kecil. Namun mengingat potensi perbankan dan keuangan syariah yang masih beredar di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang cukup serta sebagai anggota G20, perbankan syariah Indonesia mempunyai potensi untuk berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung perekonomian

nasional dan meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemerataan pembangunan nasional.⁴⁵

Perannya yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan Indonesia. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkesinambungan, maka dukungan pada sektor riil serta fokus pertumbuhan menciptakan nilai tambah perlu lebih memperoleh perhatian, seperti pengembangan ke sektor produktif yang memiliki *multiplier effect* tinggi antara lain pertanian, industri pengolahan, energi dan sektor UMKM. Selanjutnya, untuk menjaga keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri diperlukan adanya keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam melakukan aktivitas ekonomi, di mana keterkaitan hal-hal ini merupakan karakteristik yang sudah ada dalam konteks dan keuangan syariah.⁴⁶

Selain itu, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia, di mana hingga saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah-daerah tertentu khususnya pulau Jawa, Sumatera dan Bali, yang ditunjukkan dengan nilai distribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per wilayah Indonesia, dengan pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, diikuti dengan pulau Sumatera, dan yang terkecil adalah gabungan

⁴⁵ Departemen Perbankan Syariah, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Syariah, 2019), hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16

PDRB wilayah Sulawesi dan Papua. Pembangunan antar wilayah yang belum merata harus diatasi dengan alokasi dana pembangunan yang tepat sasaran. Kemudian juga, ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat memberikan tantangan tersendiri pula ke depannya, di mana dari tahun ke tahun perkembangan Indeks Gini nasional mengindikasikan ketimpangan yang semakin tinggi. Sementara konsep ekonomi dan keuangan syariah, menekankan mengenai pentingnya distribusi kesejahteraan kepada masyarakat, di mana lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah semestinya berkontribusi aktif dalam proses distribusi kesejahteraan dan pemerataan kepada masyarakat.⁴⁷

Adapun dari sisi kredit perbankan terhadap GDP, masih banyak potensi peningkatan jumlah kredit perbankan di Indonesia karena rasio kredit/GDP Indonesia yang masih di bawah 50% disebabkan masih banyaknya sektor perekonomian yang membutuhkan dukungan pembiayaan perbankan yang lebih besar namun belum tertangani dengan baik. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, sudah memiliki rasio/GDP di atas 100%. Peningkatan pembiayaan perbankan kepada sektor perekonomian membutuhkan sumber pendanaan yang lebih bervariasi yang memungkinkan bank tidak hanya bergantung pada dana jangka pendek, sehingga dalam konteks ini pendalaman pasar keuangan baik di sisi sumber dana maupun pembiayaan menjadi hal yang harus dilakukan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 18

Meski perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, akan tetapi literasi masyarakat terhadap jasa keuangan nasional juga masih rendah. Hal ini berimplikasi pada masih besarnya prospek pasar bagi industri perbankan syariah. Menurut Survey Nasional Literasi Keuangan OJK tahun 2013, hanya 22% penduduk Indonesia yang memahami jasa perbankan dan 57% penduduk yang sudah memanfaatkan jasa perbankan. Rendahnya akses ini antara lain disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank yang dianggap rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah sebenarnya tidak semata pada aspek literasi atau pengenalan produk, namun juga pada belum adanya insentif bagi nasabah untuk menggeser preferensinya dari produk bank-bank konvensional terutama yang memiliki *brand* dan produk yang mengakar di masyarakat, kepada produk perbankan syariah. Di samping itu, perbankan syariah juga masih menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan dan istilah, dan persepsi tidak adanya perbedaan dengan produk BUK atau kurang sesuai syariah. Untuk itu, perbankan syariah diharapkan bisa mendorong kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan keuangan, sehingga pemerataan pendapatan bisa terwujud dan ekonomi Indonesia juga terus tumbuh.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 19.

Demikian di dalam Islam, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam tergantung perspektif mana yang digunakan. Disimpulkan dalam Islam, ada empat indikator utama dalam mewujudkan kesejahteraan: *Pertama*, sistem nilai Islam; *Kedua*, kekuatan ekonomi pada sektor *rill* (industri dan perdagangan); *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi; *Keempat*, keamanan dan ketertiban sosial.⁵⁰

Keempat indikator di atas sejalan dengan tiga pilar ekonomi syariah yang digunakan sebagai landasan filosofis perbankan syariah, yaitu: (1) Aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, *excessive hoardings*, *unproductive*, spekulatif, dan kesewenang-wenangan. (2) Adanya keseimbangan aktivitas di sektor *rill-finansial*, pengelolaan *risk-return*, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material & azas manfaat-kelestarian lingkungan. (3) Orientasi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.⁵¹

⁵⁰ Almizan, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2016), hlm. 216.

⁵¹ Roadmap Perbankan Syariah, hlm. 08.

Sehingga dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas yang sesuai nilai-nilai Islam.

Peneliti belum menemukan penelitian yang membahas pengaruh negatif pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi berdasarkan outlook perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam rangka pengembangan perbankan syariah seperti yang sudah dipaparkan di atas.

